



Vol 20, No. 1 (2021)

Research Article

Kebijakan Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda dan Respon Umat Islam di Jambi 1915-1942 M

Rizki Transiska

UIN Sunan Kalijaga

E-mail: rizkitransiska27@gmail.com

Abstract: The history of education in Jambi is inseparable from Islam as a religion as well as the socio-political situation in Jambi at that time. Islamic educational institutions in the form of madrasahs in Jambi began to exist in 1915 AD. At that time the Dutch East Indies government was in power in Jambi. To perpetuate its power, the Dutch East Indies government issued policies. One of the policies was used to suppress Islamic education which was a scourge for the Dutch East Indies government. These policies include ethical politics, teacher ordinances, and wild school ordinances which are also implemented in Jambi. This study aims to describe the implementation of colonial educational policies in Jambi and the attitudes of Muslims in responding to these policies.

Keywords: Dutch East Indies; Islamic Education; Jambi; Policies; Respond

Pendahuluan

Masuknya Meskipun Jambi dan Belanda telah bersinggungan sejak tahun 1615, akan tetapi Pemerintah Hindia Belanda baru berhasil menduduki Jambi secara resmi dan menjadikannya keresidenan pada tahun 1906. Setelah menjadi Keresidenan Jambi, secara otomatis kesultanan dihapuskan serta tidak ada lagi jabatan kepala daerah yang dulunya dipegang oleh para anak raja (golongan bangsawan). Hal tersebut berarti penghancuran konsep tradisional mengenai *state and kingship yang* selama berabad-abad dianut masyarakat Jambi. Bagi rakyat Jambi sendiri, pemerintah Hindia Belanda sebagai pemerintah kafir tidak dapat menggantikan kedudukan sultan sebagai penjaga adat dan agama.

Tata pemerintahan di wilayah Jambi pada masa kesultanan secara berjenjang dipimpin oleh sultan, jenang, batin, penghulu, tuo-tuo, dan tengganai.¹ Setelah menjadi keresidenan, wilayah Keresidenan Jambi dibagi atas beberapa daerah yang disebut *afdeeling*. Residen Jambi dibantu oleh kontelir (*controleor*) masing-masing untuk *afdeeling* Jambi, Muaro Tembesi, Sarolangun, Bangko, Muaro Tebo, Muaro Bungo dan Kerinci. Jabatan *controleor* adalah jabatan terendah di hirarki kepegawaian pemerintah kolonial yang dipegang oleh orang Belanda. Oleh karena itu, hubungan antara *controleor* dan masyarakat Jambi sulit terjalin, sehingga diangkat seorang demang (kepala distrik atau wedana)² dari kalangan bumiputra yang telah berpendidikan. Jambi pada masa tersebut belum memiliki sumber daya manusia yang berpendidikan modern, sehingga jabatan demang dipegang oleh orang di luar Jambi, kebanyakan berasal dari Minangkabau dan Palembang.³

Kondisi Umum Pendidikan di Jambi Awal Abad ke-20

Lembaga-lembaga pendidikan Islam (pesantren/madrasah)⁴ di Jambi mulai berdiri pada pertengahan dekade kedua abad ke-20.⁵ Sekitar tahun 1912-1914, beberapa ulama Jambi yang sebelumnya menuntut ilmu di Mekah kembali ke Jambi. Sekembalinya ke Jambi, mereka mendirikan Tsamaratul Insan, sebuah organisasi yang kemudian dalam perkembangannya mendirikan lembaga pendidikan Islam di Jambi, berupa madrasah-madrasah.

Di sisi lain, pada masa tersebut pemerintah Hindia Belanda sedang menerapkan politik etis yang salah satu tujuannya menghendaki pendidikan bagi pribumi tetapi pada kenyataannya cenderung menekan pendidikan terutama pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan para tokoh agama/ulama yang mendirikan dan mengajar di pesantren atau madrasah dianggap mengusik bahkan dapat mengancam kelangsungan kekuasaan Belanda. Keadaan politik saat itu menampilkan pemerintah Hindia Belanda di satu sisi

¹ Sultan sebagai pemimpin kerajaan, jenang sebagai pemimpin rantau, batin sebagai pemimpin nagari, penghulu sebagai pemimpin luhak, tuo-tuo sebagai pemimpin kampung atau dusun, dan tengganai sebagai pimpinan rumah. Lihat Jang A. Muttalib, "Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial Di Jambi Pada Perempatan Pertama Abad Ke-20," *Jurnal Prisma*, 1980, 27; Lihat juga R. Zainuddin and dkk., *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi* (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), 23.

² Zainuddin, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, 44–45.

³ Muttalib, "Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial Di Jambi Pada Perempatan Pertama Abad Ke-20," 27.

⁴ Pesantren dan madrasah pada dasarnya sama-sama merupakan model pendidikan Islam. Penggunaan model pendidikan pesantren pada umumnya lebih banyak digunakan di Jawa, sebagaimana *surau* di Sumatra Barat, *meunasah* dan *rangrang* di Aceh, dan model pendidikan madrasah yang juga diterapkan di Jambi. Karakteristik awal lembaga pendidikan Islam di Jambi adalah madrasah. Dalam praktiknya, madrasah-madrasah di Jambi mengembangkan model pendidikan Islam tradisional, yang bercirikan kajian kitab kuning, figur tuan guru (kiai), murid, dan pondok. Karakteristik tersebut mirip dengan pesantren di Jawa, tetapi minus masjid. Sistem pesantren, yang berakar pada tradisi Jawa, adalah yang paling luas memengaruhi model pendidikan Islam di Indonesia secara umum. Lihat Muhammad Qodri, "Dinamika Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Pondok Pesantren Aljauharen Kota Jambi," *Media Akademika* 25, no. 03 (July 2010): 204; dan Ali Muzakkir, "Transformasi Pendidikan Islam Di Jambi: Dari Madrasah Ke Pesantren," *Islam Realitas: Jurnal of Islamic & Social Studies* 03, no. 01 (June 2017): 9.

⁵ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 193; Lihat juga Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), 169–171.

berusaha memperkuat serta melanggengkan kekuasaannya di Indonesia, dan di sisi lain umat Islam Indonesia yang berupaya keras untuk melepaskan diri dari cengkraman pemerintah Hindia Belanda.⁶ Oleh karena itu, untuk memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda membuat kebijakan-kebijakan. Kebijakan tersebut digunakan untuk menekan pribumi khususnya umat Islam yang menjadi penghambat bagi Hindia Belanda. Kebijakan tersebut di antaranya ialah kebijakan terkait pendidikan Islam yang dinilai mengkhawatirkan.

Pada periode politik etis, banyak lembaga pendidikan mulai didirikan, tidak terkecuali di Jambi.⁷ Sekolah yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda di daerah Jambi selama kurun waktu penerapan politik etis yaitu *volkschool*, *vervolgschool*, dan *Holandsche Inlandsce School* (HIS). Penyelenggaraan pendidikan di Jambi oleh Belanda di satu sisi ternyata bertentangan dengan semangat politik etis yang menghendaki pendidikan yang membawa kemajuan bagi pribumi. Penyelenggaraan pendidikan oleh Belanda hanya dapat ditempuh oleh golongan tertentu. Sementara itu, keberadaan pendidikan Islam, justru mengalami tekanan dan pembatasan. Keadaan tersebut mendatangkan berbagai respon dari umat Islam di Jambi. Respon tersebut dapat dilihat dari gerakan sosial berbasis pendidikan di Jambi serta sikap umat Islam di Jambi pada umumnya.

Intervensi Belanda Terhadap Pendidikan Islam di Jambi

Perkembangan Jambi yang menjadi *gewest* (keresidenan) pada 1906 telah mengukuhkan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda atas Jambi. Berbagai kebijakan juga diimplementasikan di Jambi, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Berdirinya lembaga pendidikan umum di Jambi sejalan dengan ide politik etis yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda. Peranan Belanda dalam bidang pendidikan di Jambi baru dimulai pada abad ke-20. Kurangnya perhatian Belanda terhadap pendidikan bagi pribumi di luar pulau Jawa disebabkan banyak faktor. Dalam kasus Jambi, kurangnya perhatian Belanda terhadap pendidikan di antaranya dikarenakan banyaknya pergolakan pada masa-masa Perang Jambi (1885-1907 M), perkembangan politik etis yang dijalankan Belanda tidak terlalu kentara karena upaya-upaya perlawanan dari Sultan Taha dan pengikutnya masih terus berlangsung hingga awal abad 20.

Selain itu, faktor tidak begitu menguntungkannya perekonomian yang didapat dari Jambi hingga awal abad ke-20 juga menjadi alasan lambannya perkembangan pendidikan di Jambi. Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa pada abad ke-17 sampai abad ke-19 nilai daerah Jambi hanya bergantung dari letak strategisnya sebagai pelabuhan transit lada dari wilayah pedalaman. Perekonomian Jambi baru mulai menghasilkan bagi Belanda setelah Belanda berhasil menaklukkan Jambi serta keberhasilan pertanian karet pada 1912.

⁶ Aqib H. Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), 1.

⁷ Zainuddin, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, 30 & 34.

Masa kejayaan karet atau perekonomian di Jambi secara garis besar terjadi pada 1912-1916 dan 1920 sampai sebelum 1930 ketika depresi ekonomi melanda. Ketika Jambi dianggap mulai cukup menghasilkan keuntungan bagi Belanda, maka infrastruktur mulai dibangun termasuk sekolah-sekolah. Selain itu, dengan penguasaan Belanda atas Jambi serta perkembangan ekonomi Jambi yang berimbang pula pada berkembangnya infrastruktur, maka muncul pula kebutuhan Belanda akan tenaga kerja yang punya kapabilitas sekaligus murah. Oleh sebab berbagai faktor tersebut, maka lembaga pendidikan Belanda kemudian didirikan di Jambi pada abad ke-20.

Bahkan, menurut Budihardjo dalam tesisnya, bahwa sektor pendidikan di Jambi justru baru muncul setelah tahun 1926, ketika Jambi mengalami peningkatan kehidupan ekonomi. Ia menyebutkan bahwa Sekolah Desa (*volkschool*) baru berdiri di Jambi antara tahun 1927 sampai 1929,⁸ padahal, *volkschool* sendiri pertama kali diadakan pada 1907 atas perintah Gubernur Jenderal Van Heutz.⁹

Perkembangan pendidikan formal di Jambi mulai menggeliat pada tahun 1928 ketika pemerintah Hindia Belanda mulai memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah. Kemudian, pada tahun 1933 *Hollandsch Islandsche School* (HIS) mulai didirikan di Jambi, akan tetapi, pribumi yang mengenyam pendidikan formal di sana masih sedikit. Umumnya yang bersekolah di sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda tersebut berasal dari anak demang, asisten demang, mantri, polisi, datuk pasirah dan kalangan berada lainnya. Respon masyarakat Jambi terhadap pendidikan yang diadakan oleh Belanda tersebut tidak begitu baik. Banyak masyarakat Jambi dengan sinis menjuluki HIS dengan 'Hantu Iblis Setan' (HIS).¹⁰

Kebencian masyarakat Jambi terhadap penjajahan Belanda yang dianggap pemerintah kafir ini oleh masyarakat Jambi, diwujudkan dengan menolak hal-hal yang berkaitan dengan Belanda atau kumpeni, termasuk bidang pendidikan formal yang mulanya tidak diterima oleh masyarakat Jambi. Meskipun demikian, ada pula masyarakat biasa yang sudah menyadari arti peting sekolah, sehingga tergerak untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah formal. Namun, biaya untuk dapat bersekolah di sekolah formal tersebut tidak terbilang murah bagi masyarakat Jambi umumnya. Peraturan sekolah menetapkan biaya sebesar f.40,- per bulan yang harus di bayar untuk dapat menimba ilmu

⁸ Budihardjo, "Perkembangan Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Masyarakat Daerah Jambi 1926-1942" (Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2001), 193-194; Namun, tulisan Muttalib, "Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial Di Jambi Pada Perempatan Pertama Abad Ke-20" menyebutkan bahwa *volkschool* telah berdiri sebelum 1907. Muttalib menyebutkan bahwa pada permulaan 1916 mulai diperkenalkan pajak sekolah sebesar f. 0.50 per Kepala Keluarga. Selain itu, disebutkan pula mengenai rendahnya minat masyarakat Jambi untuk sekolah di Sekolah Dasar Kelas Dua (*de schoolen der tweede klasse*) dan *volkschool*. Hal tersebut diperkuat pula oleh *Algemeen Verslag (Inlandsch Onderwijs)*, yaitu laporan pendidikan daerah pedalaman pada tahun 1901. *Algemeen Verslag (Inlandsch Onderwijs)*, 1901 yang dikutip S. Nasution dalam *Sejarah Pendidikan Indonesia* halaman 63 menunjukkan bahwa terdapat lima Sekolah Kelas Dua di Jambi dengan jumlah penduduk 125.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekolah Belanda di Jambi telah ada sebelum 1926, meskipun perkembangannya tidak pesat. *ibid.*, 30; dan S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Bandung: Jemmars, 1983), 63.

⁹ Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, 77; Lihat juga Djohan Makmur and dkk., *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Penjajahan* (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993), 78.

¹⁰ Budihardjo, "Perkembangan Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Masyarakat Daerah Jambi 1926-1942," 193-194.

di sekolah formal.¹¹ Hal tersebut tentunya berbanding terbalik dengan pendidikan madrasah di Jambi yang umumnya tidak memungut biaya dari para muridnya.

Perkembangan pendidikan formal di Jambi tidak berlangsung lama, akibat krisis ekonomi dunia yang melanda pemerintah Hindia Belanda. Depresi ekonomi yang melanda pada 1930 tersebut berdampak pada bantuan pendidikan bagi Sekolah Desa yang kembali berkurang. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan keengganan pemerintah Belanda menyediakan dana bagi keberlangsungan pendidikan bumiputra ini mengurangi efisiensi sistem pendidikan Sekolah Desa. Penutupan sekolah-sekolah tersebut juga berdampak pada diberhentikannya 33 orang guru.¹² Dalam rangka penghematan anggaran, pemerintah Hindia Belanda menutup sejumlah *volkschool* di Jambi, Sarolangun, Bangko, Muaro Bungo, dan Muaro Tebo, karena tidak mampu lagi memberi subsidi. Pada tahun 1931 pemerintah Hindia Belanda menutup sebanyak 8 sekolah *volkschool*.

Selain *volkschool*, di Jambi juga terdapat Sekolah Rendah (*vervolgschool*). Terdapat sepuluh *vervolgschool* yang didirikan di Jambi. Sepuluh *vervolgschool* tersebut berada di Kota Jambi, Olak Kemang (Seberang sungai Kota Jambi), Muaro Bungo, Tanah Tumbuh, Rantau Ikil, Muaro Tebo, Teluk Rendah, Teluk Kual, Sarolangun, Rantau Panjang. Lama belajar di *vervolgschool* ialah lima tahun. Para murid yang sudah tamat dari *volkschool* tiga tahun, kemudian dapat melanjutkan ke sekolah *vervolgschool* dan diterima di kelas 1V. *Vervolgschool* ini disebut juga *Sekolah Gubernemen*, karena dananya sepenuhnya dari pemerintah Hindia Belanda, dan ada yang menyebutnya *Sekolah Melayu* sebab bahasa pengantarnya bahasa melayu.¹³

Pada tahun 1934 selain *volkschool* dan *vervolgschool*, ada satu sekolah untuk anak Eropa/Belanda yang disebut *Europeesche Lagere School* (ELS), *Hollands Chinese School* (HCS) untuk anak-anak China, dan satu sekolah Belanda untuk bumiputera yang disebut *Hollandsche Inlandsche School* (HIS) tujuh tahun.¹⁴ Salah satu kurikulum HIS di antaranya yaitu mempelajari bahasa Belanda, di samping juga mempelajari bahasa Melayu. Pada tahun 1934 murid HIS berjumlah 194 orang dengan jumlah guru enam orang. Hanya terdapat empat persen pribumi, dari total 194 murid tersebut. Tahun 1936 kepala sekolahnya (*hoofd der school*) diganti dengan orang Indonesia asli yang memiliki ijazah *Nederlandsch Hoofdacte* yaitu Raden Momon Wirakesuma dari Bandung.¹⁵ Setelah itu, secara berangsur-angsur masyarakat Jambi mulai memasukkan anaknya, setelah ada pendekatan yang dilakukan oleh kepala sekolah, tokoh adat, pemuka agama serta cerdik pandai. Sekolah tersebut berlangsung sampai kedatangan Jepang 1942.

Pada tahun 1937 didirikan *Cursus voor Lagere Onderwijs* (CVO) atau *leergang* di Jambi. Sekolah ini menerima murid tamatan dari *vervolgschool* lima tahun, untuk dididik dan kemudian dapat diangkat menjadi Guru Sekolah Desa (*volkschool*) tiga tahun tahun,

¹¹ Ibid.

¹² Makmur, *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Penjajahan*, 78.

¹³ Budihardjo, "Perkembangan Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Masyarakat Daerah Jambi 1926-1942," 196-197.

¹⁴ Zainuddin, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, 53.

¹⁵ Budihardjo, "Perkembangan Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Masyarakat Daerah Jambi 1926-1942," 197.

yang muridnya diasramakan dan gurunya mendapat gaji f. 12,50,- sebulan.¹⁶ Pada 1938 juga didirikan sekolah swasta yaitu *Neutrale School* yang setingkat dengan *schakelschool* yang kepala sekolahnya bernama Raden Basuki, sebelumnya merupakan guru pada sekolah Yayasan Theresia.¹⁷ Pada waktu itu di Jambi belum ada jenjang pendidikan *Middelbare Uitgebreid voor Lager Onderwijs* (MULO). Oleh karena itu, bagi murid yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang MULO harus ke Bukit Tinggi, Palembang, Medan atau Jakarta.¹⁸ Selain sekolah-sekolah pemerintah tersebut, tidak banyak sekolah formal yang berdiri di Jambi, sekolah-sekolah pergerakan nasional seperti Taman Siswa tidak dapat menjangkau Jambi karena ketatnya pengawasan Belanda terhadap Jambi pasca Perang Sarekat Abang 1916.¹⁹

Belanda tampak paradoks dalam menentukan sikapnya terhadap Islam di Indonesia. Belanda mengklaim bahwa mereka bersikap netral terhadap Islam sebagai agama. Namun, di sisi lain Belanda terlihat diskriminatif dengan memberikan kelonggaran serta bantuan uang lebih banyak kepada kalangan misionaris Kristen.²⁰ Berbagai sikap diskriminatif Belanda terhadap umat Islam begitu kentara untuk melemahkan Islam di Indonesia. Hal tersebut juga tampak dalam berbagai ordonansi yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda.

Sikap diskriminatif Belanda terhadap pendidikan Islam semakin jelas, melalui penerbitan Ordonansi Guru (*Staatsblad van Nederlansch-Indie* tahun 1905 No. 550) diberlakukan di Jawa dan Madura pada 1905 dan mulai berlaku sampai ke luar pulau Jawa pada 1925. Ordonansi tersebut berisi tentang wajibnya guru agama Islam, termasuk di dalamnya para kiai, guru ngaji, dan pemimpin tarekat, untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu kepada pemerintah kolonial, melalui masing-masing residen, sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama di daerahnya.²¹ Hal tersebut bertujuan untuk mengawasi dan menekan perkembangan pendidikan Islam. Selain itu juga berkaitan erat dengan kekhawatiran pihak kolonial, atas gerakan-gerakan Islam yang dianggap berbahaya karena sering melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap kolonial, terutama setelah terjadinya peristiwa pemberontakan petani Cilegon yang dimotori oleh

¹⁶ Ibid., 198–199.

¹⁷ Ibid., 198.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Perang Sarekat Abang ialah peristiwa perlawanan senjata, dipelopori oleh Sarekat Islam (SI) yang berkembang di wilayah pedalaman Jambi, yaitu Sarekat Abang. Terdapat dua kelompok Sarekat Islam di Jambi, yaitu Sarekat Islam di daerah pesisir dan Sarekat Islam di daerah pedalaman. Daerah pesisir merupakan daerah pusat pemerintahan kolonial. Tidak mengherankan jika SI di pesisir beranggotakan golongan menengah yang berorientasi pada perbaikan kondisi sosial ekonomi pribumi. Sebaliknya, SI yang berada di pedalaman menjadi organisasi rakyat biasa yang radikal. Ide radikal itu tidak terlepas dari ilmu abang yang melekat pada SI pedalaman. Ilmu abang yang dimiliki masyarakat pedalaman tersebut ialah ilmu yang mengandung ajaran tarekat dari berbagai aliran, serta ajaran ilmu kebal. Oleh karena itu, Sarekat Islam di daerah pedalaman yang radikal tersebut lebih dikenal sebagai Sarekat Abang dan membedakan diri dari Sarekat Islam “resmi” di pesisir yang mereka sebut SI Putih atau Sarekat Kumpeni. Lihat Muttalib, “Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial Di Jambi Pada Perempatan Pertama Abad Ke-20,” 33–34.

²⁰ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1991), 333.

²¹ Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 51–52.

para haji dan guru agama.²² Meski berdalih demi keamanan dan ketertiban, tidak dapat dipungkiri bahwa ordonansi yang dikeluarkan pemerintah semakin memberatkan tugas pendidikan yang dilaksanakan oleh umat Islam. Hal tersebut berdampak juga pada kebodohan dan kemiskinan yang semakin terlihat serta menjadi gejala umum bagi pribumi.²³

Ordonansi Guru tersebut dinilai sebagai sikap diskriminatif pemerintah kolonial Belanda. Peraturan ini memang mudah dijalankan oleh sekolah yang memiliki organisasi yang rapi, tetapi tidak demikian halnya dengan guru-guru agama Islam. Mereka tidak menyelenggarakan administrasi yang rapi dalam mengatur sekolah atau pengajian. Bahkan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren maupun madrasah tidak menyelenggarakan administrasi seperti itu, tidak mencatat nama seluruh santri atau guru-guru yang mengajar di sana. Pengawasan yang amat ketat dan terus-menerus terhadap para guru agama Islam dianggap sebagai pembatasan kemerdekaan mereka. Lebih tragis lagi peraturan itu juga membatasi materi yang diajarkan. Hal ini dinilai sebagai pengekan tanpa batas yang jelas.

Pada tahun 1905 ketika Ordonansi Guru pertama kali diterbitkan, ordonansi tersebut belum berlaku di Jambi. Hal tersebut di antaranya karena cakupan wilayah yang diatur oleh ordonansi tahun 1905 yang masih meliputi Jawa dan Madura saja. Selain itu, perhatian terhadap pendidikan Islam secara melembaga belum giat dimunculkan, masyarakat masih menjalankan pola mengaji setiap petang ke surau maupun ke rumah guru. Wilayah Jambi juga belum sepenuhnya resmi berada di bawah pemerintahan Belanda. Pergolakan dan perlawanan yang berlangsung selama Perang Jambi pun belum benar-benar tuntas, sehingga fokus Belanda masih pada pengukuhan pondasi awal kedudukannya di Jambi serta melumpuhkan perlawanan yang berlangsung di Jambi.

Keberadaan madrasah-madrasah serta sekolah-sekolah yang didirikan di wilayah keresidenan Jambi sejak abad ke-20 terus mengalami perkembangan. Hal itu menjadi momok bagi Belanda. Pengembangan sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda yang bersifat diskriminatif tidak banyak dilirik oleh masyarakat, bahkan cenderung dibenci. Kebutuhan pengetahuan bagi masyarakat Jambi kebanyakan tidak disalurkan dengan mengenyam pendidikan formal dari pemerintah kolonial. Masyarakat lebih memilih mengenyam pendidikan madrasah atau sekolah swasta yang didirikan oleh sesama pribumi. Keberadaan madrasah dan sekolah tersebut menjadi tantangan bagi pihak pemerintah kolonial disebut, mereka menyebutnya sebagai *Wilde Scholen* atau Sekolah Liar, pemerintah kolonial bahkan mengeluarkan ordonansi untuk menyingkirkan sekolah-sekolah pribumi tersebut.²⁴

²² Ibid., 52; Lihat juga Nurul Hak, "Perubahan Sosial Pesantren Di Tasikmalaya Pada Paruh Pertama Abad Ke-20 (1905-1950)" (Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2003), 122–123.

²³ Jahdan Ibnu Humam Saleh, "Perkembangan Pendidikan Muhammadiyah Pada Pemukiman Santri Di Kota Yogyakarta 1912-1942" (Thesis, Universitas Gadjah Mada, 1991), 28.

²⁴ Moh. Slamet Untung, "Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren," *Jurnal Forum Tarbiyah* 11, no. 01 (June 2013): 8.

Pelaksanaan Ordonansi Sekolah Liar ini diterapkan Belanda di Jambi dengan cara tidak mengizinkan pendirian sekolah-sekolah swasta baru, mempersulit proses berdirinya sekolah-sekolah baru, terutama sekolah-sekolah berbasis agama Islam, serta menutup sekolah-sekolah yang dianggap melanggar peraturan yang termuat di *Staatsblad van Nederlansch-Indie* tahun 1932 No. 494 dan 495. Belanda membuat aturan-aturan yang ketat mengenai pendirian sekolah-sekolah swasta baru. Sekolah-sekolah agama kesulitan memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah tersebut, terutama dengan adanya ketentuan yang ketat dalam pengangkatan guru-guru agama. Serta adanya syarat guru-guru sekolah swasta yang akan didirikan haruslah lulusan sekolah-sekolah yang didirikan Belanda.²⁵

Di Jambi, Ordonansi Sekolah Liar ini dialami beberapa lembaga pendidikan. Di antaranya ialah Saqafah Islamiyah di Sarolangun dan Sumatera Thawalib cabang Kerinci. Pendiri Saqafah Islamiyah ialah H. Nawawi, yang merupakan seorang ulama lulusan Mekah. Ia mendirikan Saqafah Islamiyah di Dusun Gurun Tuo, Sarolangun. Sekolah tersebut pada mulanya tidak memperoleh izin berdiri dari Belanda. Namun, setelah adanya protes yang dilakukan H. Nawawi melalui surat yang dikirimkannya kepada Gubernur Jendral, maka Saqafah Islamiyah di Gurun Tuo, Sarolangun, dapat berdiri. Dalam Pasal 15 *Staatsblad van Nederlansch-Indie* tahun 1932 No. 494,²⁶ terdapat aturan yang memungkinkan H. Nawawi memprotes izin pendirian sekolah yang tidak diberikan pemerintah daerah dengan melakukan banding ke Gubernur Jendral. Usaha banding tersebut dimanfaatkan H. Nawawi untuk menunjukkan tujuan Sekolah Saqafah Islamiyah yang terlepas dari kepentingan politik yang ditakutkan Belanda. Di Kerinci terdapat sekolah yang didirikan oleh Sumatera Thawalib di bawah pimpinan H. Azhari.²⁷ Sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah di Jambi yang terkena dampak Ordonansi Sekolah Liar dan ditutup oleh Belanda.

Taman siswa sebagai perguruan swasta nasional yang terkenal luas mendapat imbas dari adanya Ordonansi Sekolah Liar ini pada saat itu belum menjangkau Jambi. Namun, lulusan sekolah Taman Desa Raya di pulau Jawa, yaitu M. Chatib Tabun, H.M. Chatib dan A.T. Hanafiah berhasil mendirikan sekolah-sekolah di Jambi. M. Chatib Tabun berhasil mendirikan *Nederlandsche School*, di Sarolangun. H.M. Chatib dan A.T. Hanafiah mendirikan *Schakel School* di Sarolangun juga. Sekolah-sekolah tersebut mengajarkan mata pelajaran sekolah dasar dan bahasa Belanda. Meskipun sekolah-sekolah tersebut tidak ditutup oleh Belanda, akan tetapi, guru-gurunya tetap mendapatkan pengawasan yang ketat oleh Belanda.²⁸

Terhadap madrasah-madrasah yang telah didirikan sejak tahun 1915 oleh Tsamaratul Insan di Jambi, Belanda tidak mengenakan Ordonansi Sekolah Liar sehingga

²⁵ Zainuddin, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, 74–74.

²⁶ Lihat lampiran 3, 94.

²⁷ Sumatera Thawalib adalah suatu partai atau lembaga pendidikan islam yang militan, tegas anti penjajahan dan anti modal asing. Lihat Zainuddin, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, 76.

²⁸ *Ibid.*, 75.

madrasah-madrasah tersebut tidak ditutup.²⁹ Hal tersebut besar kemungkinan dikarenakan pelobian yang kuat dan kedekatan salah satu petinggi Tsamaratul Insan, Sayyid 'Ali al-Musawwa dengan Belanda. Meski begitu, Belanda tidak lantas melepaskan pengawasannya terhadap madrasa-madrasah yang didirikan Tsamaratul Insan. Belanda tetap melakukan pengawasan ketat terhadap Tsamaratul Insan dan madrasah-madrasah terutama dalam hal pengangkatan guru agama baru.

Pada beberapa kasus di Jambi, campur tangan pemerintah Hindia Belanda terkait pendidikan dan guru agama tidak hanya terlihat dari Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar saja. Intervensi pemerintah Hindia Belanda juga tampak melalui kebijakan yang terapkan secara insidental. Bentuk intervensi tersebut dapat dilihat pada penutupan sekolah yang didirikan oleh Ahmad Basuki dan Guru Hasan. Sekolah tersebut bernama *Neutrale Hollandsch Indlandsche School*. Penutupan sekolah yang didirikan oleh Ahmad Basuki dan Guru Hasan tersebut dikarenakan adanya *onderwijs verbod*. Melalui *onderwijs verbod* tersebut, polisi memiliki hak campur tangan dalam pengajaran. Polisi sewaktu waktu dapat melakukan penggeledahan terhadap sekolah dan rumah-rumah guru. Dengan berbagai macam alasan yang dicari-cari dan dengan tuduhan membuat kwitansi palsu akhirnya Ahmad Basuki ditangkap dan dihukum. *Neutrale Hollandsch Indlandsche School* pun akhirnya ditutup.³⁰

Selain *onderwijs verbod*, intervensi yang dilakukan Belanda di bidang pendidikan juga ditunjukkan melalui penerapan Undang-undang *Passenstelsel* terhadap Ilyas Ya'kub. Pada tahun 1935 ketika seorang ulama dari Sumatera Barat bernama Ilyas Ya'kub ingin mengajar di Madrasah Nurul Iman, pemerintah Hindia Belanda ikut campur dengan menerapkan Undang-undang *Passenstelsel* yaitu undang-undang yang menyatakan keberhakan Belanda mengusir seseorang dari tempat dengan alasan ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, Ilyas Ya'kub kembali ke Padang Panjang karena dicurigai berpandangan ekstrem.³¹

Respon Umat Islam di Jambi

Mengenai sistem persekolahan, tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan pendidikan bagi pribumi oleh Belanda memiliki tujuan oportunisme demi mendapatkan pegawai murah terdidik. Oleh karena itu, pada awal abad ke-20 perekonomian Jambi yang tidak memberi keuntungan bagi Belanda turut menjadi faktor minimnya perhatian Belanda terhadap pembangunan infrastruktur maupun sekolah di Jambi. Selain itu, adanya praktik diskriminasi yang kental serta biaya sekolah yang tidak sedikit bagi pribumi menjadi salah satu penyebab kurang berhasilnya penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kesempatan pendidikan hanya ada bagi golongan tertentu saja, hanya sedikit sekali pribumi dari golongan bangsawan maupun pejabat yang dapat bersekolah di

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid., 76; Lihat juga R. Zainuddin, *Sejarah Pendidikan Daerah Jambi* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980), 48.

³¹ Zainuddin, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, 76.

sekolah Belanda, padahal pendidikan adalah kebutuhan yang mendasar bagi semua kalangan.

Keadaan tersebut, secara tidak langsung mendorong berdirinya madrasah-madrasah di Jambi, serta sebagai respon atas kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda yang masif pada awal abad ke-20. Kebutuhan masyarakat Jambi akan pengetahuan sulit diperoleh melalui sistem persekolahan Belanda sebab sekolah Belanda di Jambi belum merata hingga awal abad ke-20. Selain itu, praktik sekolah Belanda yang bersifat diskriminatif, biaya sekolah yang tinggi bagi pribumi, serta semangat anti-kafir dalam sanubari masyarakat Jambi, turut menjadi pemantik munculnya lembaga pendidikan Islam formal di Jambi.

Sejak politik etis diberlakukan di Indonesia, pendidikan diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan Barat melalui politik asosiasi kebudayaan. Snouck Hurgronje, penasehat Belanda mengenai urusan Islam di Indonesia, yang menyadari bahaya Pan-Islamisme, mendesak agar rakyat Indonesia dipengaruhi untuk menjauhi gagasan Pan-Islamisme dengan memberikan pendidikan Barat melalui asosiasi dengan Belanda.³² Secara khusus kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda dijadikan instrumen yang ampuh untuk mengurangi dan akhirnya mengalahkan pengaruh Islam di Indonesia.³³

Terhadap politik etis, dengan adanya sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda di Jambi, masyarakat Jambi pada umumnya menolaknya. Peraturan sekolah-sekolah modern tersebut yang mengharuskan muridnya memakai celana, rambut digunting, membaca, menulis huruf latin, dan memakai Bahasa Belanda, ditentang rakyat karena hal tersebut dianggap kebiasaan orang kafir.³⁴ Rakyat Jambi lebih memilih menyembunyikan anak-anaknya agar tidak masuk sekolah. Bahkan, pemaksaan melalui kepala-kepala dusun dan aparat menimbulkan kemarahan rakyat. Selain itu, tingginya pajak sekolah yang dikenakan juga semakin menyengsarakan rakyat, terutama ketika rakyat Jambi turut terkena imbas depresi ekonomi.

Menanggapi kebutuhan akan pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang tidak mungkin didapatkan dari pemerintah Hindia Belanda, bersamaan pula dengan momentum kembalinya ulama-ulama Jambi dari Timur Tengah maka didirikanlah organisasi Tsamaratul Insan. Tsamaratul Insan ialah perukunan atau organisasi sosial yang banyak berfokus pada pendidikan. Organisasi sosial-pendidikan tersebut berdiri ketika Jambi telah menjadi *gewest* di bawah Kepala Residen Jambi. Pada awal berdirinya, perukunan ini anggotanya hanya sedikit, yang terdiri dari para ulama dan beberapa pedagang serta petani. Bentuk serta program perukunan ini pun sederhana, hanya mengurus urusan kematian, memberikan pertolongan kepada anggota yang tertimpa musibah atau kemalangan, serta kesejahteraan sosial anggotanya. Pada perkembangannya, perukunan Tsamaratul Insan mendapatkan izin resmi pemerintah Hindia Belanda berdasarkan izin

³² Untung, "Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren," 7.

³³ Ibid.

³⁴ Adrianus Chatib, *Kesultanan Jambi Dalam Konteks Sejarah Nusantara* (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), 59.

Residen Negeri Jambi nomor 1636 sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pendiriannya yang dibuat di Jambi pada 10 September 1915 bertepatan dengan 1 Zulq'adah 1333 H.³⁵

Berdirinya Tsamaratul Insan ini memicu munculnya harapan dan juga tanggapan sesuai kepentingan masing-masing pihak. Belanda berharap bahwa berdirinya Tsamaratul Insan memudahkan pendekatan dan kontrol terhadap kegiatannya. Mengingat organisasi tersebut bersifat lokal dan tidak terkait dengan daerah lain, anggotanya juga merupakan penduduk asli, dan kegiatannya hanya terkait bidang ibadah keagamaan saja. Menurut Sarekat Islam di Jambi, berdirinya Tsamaratul Insan merupakan usaha Belanda untuk melemahkan perjuangan masyarakat Jambi. Berdirinya Tsamaratul Insan dianggap sebagai organisasi buatan Belanda serta sebagai upaya Belanda untuk memecah belah umat Islam di Jambi. Bagi masyarakat Jambi sendiri, berdirinya Tsamaratul Insan diharapkan dapat menyatukan masyarakat Jambi untuk meningkatkan usaha bersama dalam pengembangan ajaran Islam sebagaimana tujuan awal didirikan.

Faktor pendorong pesatnya pertumbuhan madrasah-madrasah di Jambi di antaranya ialah pesatnya keberadaan sekolah-sekolah Belanda di Jambi setelah tahun 1926. Di samping itu, kembalinya para tokoh Jambi dari menuntut ilmu dan kemudian menyelenggarakan pendidikan di kampung asalnya menjadi variabel penting lainnya. Pendidikan Islam di Jambi pada abad ke-20 ditandai dengan era baru setelah para ulama alumni Timur Tengah kembali ke Jambi. Semangat untuk mengembangkan pendidikan sebagai jalan mencerdaskan masyarakat Jambi ini juga muncul karena kejenuhan sebagian umat Islam di kota atas Perang Jambi yang berkepanjangan. Kebencian masyarakat Jambi terhadap penjajah memunculkan dua pola reaksi yang berbeda. Perang Jambi yang berlangsung sejak 1858 hingga wafatnya tokoh-tokoh sentral perlawanan seperti Sultan Taha pada 1904 lalu Panglima Perang Jambi, Raden Mat Taher pada 1907, nyatanya tidak benar-benar mematikan perlawanan masyarakat Jambi. Di wilayah pedalaman sebagai basis pendukung perlawanan Sultan Taha, perlawanan secara sporadis masih terus berlangsung. Di sisi lain, masyarakat kota lebih memilih jalan mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan. Hal ini bersamaan pula dengan momentum kembalinya para ulama dari Timur Tengah. Kemudian didirikanlah lembaga pendidikan Islam formal yang dibawah organisasi Tsamaratul Insan yang mereka didirikan.³⁶

Sistem pendidikan yang sebelumnya polanya berupa murid-murid yang belajar mengaji di surau/langgar/rumah guru kemudian disemarakkan dengan munculnya sistem madrasah. Sistem Madrasah yang diterapkan ini diadopsi dari tempat para ulama tersebut tersebut menuntut ilmu sebelum kembali ke Jambi. Para ulama yang kembali ke Jambi setelah menimba ilmu di Timur Tengah di antaranya ialah, H. Abd al-Shamad bin H. Ibrahim, H. Ibrahim bin H. 'Abd al-Majid, H. Ahmad bin 'Abd al-Syakur, H. Utsman bin H. Muhammad 'Ali, Kemas H. Muhammad Shaleh bin Kemas H. Muhammad Yasin dan

³⁵ Fauzi MO. Bafadhal, "Sejarah Sosial Pendidikan Islam Di Jambi" (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 2 & 91-92.

³⁶ Ibid., 72-74.

Sayyid Alwi bin. Muhammad. Para ulama alumni Timur Tengah tersebut pada 1914 mendirikan *kuttab* (tempat baca tulis) yang sederhana, terbuat dari bambu sehingga disebut “Madrasah Bambu/Buluh”.

Pada perkembangannya kemudian, dibentuklah Tsamaratul Insan pada tahun 1915.³⁷ Tsamaratul Insan didirikan sebagai payung hukum yang mengurus permasalahan umat Islam di Jambi. Salah satu fokusnya yaitu dalam bidang pendidikan. Pada bidang ini, Tsamaratul Insan mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa madrasah. Madrasah-madrasah yang didirikan oleh Tsamaratul Insan di antaranya adalah Madrasah Nurul Iman, Madrasah Nurul Islam, Madrasah Sa’adatuddarain, dan Madrasah al-Jauharain.

Madrasah Nurul Iman merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam pertama yang didirikan di Jambi. Pendirian Madrasah Nurul Iman tidak terlepas dari peranan para ulama anggota Tsamaratul Insan. Di antara tokoh-tokoh pendiri Madrasah Nurul Iman ialah H. Abd al-Shamad bin H. Ibrahim, Sayyid Ali al-Musawwa, H. Ahmad bin ‘Abd al-Syakur, H. Utsman bin H. Muhammad ‘Ali, dan Kemas H. Muhammad Shaleh bin Kemas H. Muhammad Yasin. *Mudir* pertama madrasah Nurul Iman adalah H. Ibrahim bin H. ‘Abd al-Majid.³⁸

Madrasah-madrasah tertua yang berada di bawah naungan perkunan Tsamaratul Insan rata-rata berdiri di Seberang Kota Jambi (termasuk wilayah Ibu Kota Keresidenan Jambi). Selain di Seberang Kota Jambi, wilayah-wilayah di luar pusat kota keresidenan Jambi juga berdiri lembaga pendidikan Islam, baik tradisional maupun yang telah memasukkan pelajaran umum. Lembaga pendidikan tersebut di antaranya ialah, Madrasah Sumatera Thawalib di Kerinci, *Schakel School* di Sarolangun, Madrasah Rawaniyyah di Kerinci. Di Lubuk Landai, suatu dusun di daerah Bungo berdiri pula Madrasah pada tahun 1928. Biaya yang dibebankan kepada setiap wali murid yang menuntut ilmu di madrasah tersebut sebesar *f.* 10 - *f.* 30 per tahun untuk keperluan menggaji ustaz, pembelian alat-alat belajar dan biaya keperluan operasional madrasah lainnya.

Pada tahun 1937, berdiri pula Madrasah Saqafah di Gurun Tuo, Sarolangun. Madrasah Saqafah tersebut didirikan oleh Haji Nawawi bin Ahmad. Kurikulum madrasah Saqafah juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum seperti ilmu bumi, ilmu alam, ilmu aljabar, ilmu hewan, bahasa, termasuk Bahasa Inggris. Madrasah tersebut juga mengadakan diskusi-diskusi politik dengan mendatangkan pakar politik misalnya Kahar Muzakir. Haji Nawawi juga merupakan sosok yang giat meneliti kitab-kitab kuning, sehingga ia dicurigai bermazhab wahabi dan merupakan penganut Pan-Islamisme oleh pemerintah belanda.

Pada tahun 1905 ketika adanya Ordonansi Guru pertama yang menghambat perkembangan pendidikan Islam, madrasah di Jambi belum menjadi suatu lembaga yang terorganisir. Pada masa itu, pola pendidikan masyarakat Jambi ialah mengaji setiap petang ke surau maupun ke rumah guru. Jadi, Ordonansi Guru tahun 1905 belum berdampak

³⁷ Ibid., 199; Lihat juga Muzakir, “Transformasi Pendidikan Islam Di Jambi: Dari Madrasah Ke Pesantren,” 11; Bafadhal, “Sejarah Sosial Pendidikan Islam Di Jambi,” 72–74; Fadhil, “Pembaharuan Pendidikan Islam KH. Abdul Qadir Di Madrasah As’ad Seberang Kota Jambi 1951-1970” (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 82.

³⁸ Bafadhal, “Sejarah Sosial Pendidikan Islam Di Jambi,” 107–111.

pada pendidikan di Jambi. Faktor lainnya, yaitu wilayah Jambi yang belum sepenuhnya resmi berada di bawah pemerintahan Belanda. Pergolakan dan perlawanan yang berlangsung selama Perang Jambi pun belum benar-benar tuntas, sehingga fokus Belanda masih pada pengukuhan fondasi awal kedudukannya di Jambi serta melumpuhkan perlawanan yang berlangsung di Jambi.

Ketika menilik respon atas implementasi Ordonansi Guru tahun 1905 yang berlaku di Jawa dan Madura, ordonansi tersebut juga tidak menimbulkan protes dari pihak Islam sendiri di Jawa. Hal ini tidak dapat dipahami bahwa mereka menerima peraturan tersebut. Faktor-faktor tidak adanya protes ketika itu lebih dikarenakan oleh rendahnya kesadaran tentang dampak dari pemberlakuan peraturan tersebut dan ketidaktahuan para guru agama dalam mengorganisir diri menghadapi kesewenang-wenangan Belanda ketika itu. Baru pada 1922 timbul kesadaran umat Islam untuk memprotes kebijakan pendidikan kolonial yang diwujudkan melalui Kongres al-Islam tahun 1922. Dalam Kongres tersebut Ordonansi Guru 1905 dipandang sebagai bentuk penghambatan terhadap aktivitas pendidikan Islam. Protes dari kalangan umat Islam tersebut mendapat respon pemerintah Hindia Belanda. Belanda mencabut Ordonansi Guru 1905 melalui penerbitan Ordonansi Guru 1925.³⁹ Ordonansi Guru 1925 oleh Belanda diklaim lebih lunak daripada Ordonansi Guru 1905.

Ordonansi Guru 1925 terbit melalui *Staatsblad van Nederlansch-Indie* tahun 1925 No. 219. dan secara praktis berlaku juga di Jambi. Tsamaratul Insan sebagai sebuah organisasi penting yang mendirikan beberapa madrasah-madrasah utama di Jambi turut menunjukkan sikap terhadap kebijakan pendidikan kolonial. Sikap Tsamaratul Insan cenderung patuh dan tidak memberontak terhadap kebijakan pendidikan kolonial. Sikap submisif dipilih Tsamaratul Insan demi keberlangsungan pendidikan Islam yang didirikannya. Meskipun demikian, Tsamaratul Insan tetap mematri kebencian terhadap penjajah Belanda dan semangat anti-kafir dalam lingkungan madrasah-madrasah. Sikap submisif Tsamaratul Insan tersebut berhasil melanggengkan keberadaan madrasah-madrasah yang didirikannya. Belanda juga cenderung tidak mengusik madrasah-madrasah di bawah Tsamaratul Insan yang memang telah lama berdiri sebelum terbitnya Ordonansi Guru 1925 dan tidak menampakkan upaya konfrontatif terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Pelaksanaan Ordonansi Guru berupa pendataan dan pengawasan ketat yang dilakukan Belanda kebanyakan dilakukan kepada sekolah-sekolah atau madrasah baru. Pendiri madrasah-madrasah tersebut merupakan para tokoh yang kembali ke Jambi dari menuntut ilmu di sekolah yang dibawah pergerakan nasional. Selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah yang guru maupun institusinya berafiliasi dengan organisasi-organisasi yang lantang melakukan perlawanan kepada Belanda, seperti Sumatra Thawalib, Sarekat Islam, dan sebagainya.

Perlawanan lembaga pendidikan Islam terhadap pemerintah kolonial Belanda dilakukan dalam rangka menjaga identitas religio-kulturalnya dari kedigdayaan penetrasi sistem pendidikan sekuler dan invasi militer Belanda. Perlawanan pesantren (madrasah)

³⁹ Untung, "Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren," 13.

tersebut muncul secara tersembunyi dan terbuka. Menurut Mahmud Arif dalam disertasi berjudul *Pendidikan Islam Transformatif*, perlawanan tersembunyi diwujudkan dalam bentuk sikap konservatif, defensif, dan isolasionis, sedangkan perlawanan terbuka dimanifestasikan dalam bentuk sikap nonkooperatif dan pengobaran semangat anti penjajah. Langkah ini dilatarbelakangi oleh semakin menguatnya penetrasi budaya Barat modern dan kebijakan diskriminatif pemerintah Kolonial Belanda terhadap umat Islam.⁴⁰

Reaksi yang ditunjukkan masyarakat Jambi pada umumnya yang direpresentasikan oleh madrasah dan para ulama, memang cenderung tidak vokal, jika dibandingkan dengan penolakan-penolakan dari komunitas umat Islam lainnya.⁴¹ Hal ini juga terjadi dikarenakan kuatnya pengaruh Belanda dalam mengisolasi Jambi dari semua organisasi politik dan pergerakan yang terjadi di luar Jambi pasca adanya perlawanan Sarekat Abang tahun 1916.

Madrasah di Jambi menunjukkan sikap perlawanan tersembunyi dalam menghadapi kebijakan pemerintah Hindia Belanda terkait pendidikan. Perlawanan tersembunyi tersebut diwujudkan dalam bentuk sikap konservatif, defensif, dan isolasionis. Sikap konservatif, defensif, dan isolasionis tersebut misalnya, tampak dalam madrasah-madrasah di bawah Tsamaratul Insan, baik Nurul Iman, Nurul Islam, Sa'adatuddarain, dan al-Jauharain, cenderung bersikap konservatif. Meskipun tidak melakukan perlawanan secara konfrontatif terhadap pemerintah Hindia Belanda, mereka dengan jelas menolak segala bentuk "atribut Belanda" dalam madrasah. Materi-materi pelajaran untuk madrasah-madrasah di bawah Tsamaratul Insan menolak ilmu umum, bahkan pakaian-pakaian yang identik dengan Belanda juga dilarang karena dianggap merupakan kebiasaan orang kafir. Ketidaksetujuan Tsamaratul Insan terhadap Belanda tetap tampak meskipun tidak dilakukan secara agresif dan konfrontatif. Hal itu terjadi mengingat pasca Perang Sarekat Abang, Belanda melakukan pembersihan secara total kepada bibit-bibit pemberontakan serta mengisolasi Jambi dari pergerakan nasional yang berlangsung masa itu.⁴²

Secara umum di Jambi setelah berakhirnya Perang Sarekat Abang tahun 1916 dengan kekalahan, upaya-upaya perlawanan terhadap Belanda tidak lagi kentara. Sikap rakyat Jambi tentunya masih non-kooperatif terhadap Belanda. Akan tetapi, hal tersebut tidak ditunjukkan dengan terang-terangan, sebab ancaman hukuman berat yang akan dijatuhkan kepada rakyat yang berani melahirkan pemikiran baik melalui tulisan maupun lisan.⁴³ Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga tampaknya berhasil mengamankan kekuasaannya di Jambi dengan mengatasi perlawanan fisik dalam Perang Sarekat Abang hingga ke akar-akarnya. Banyak tokoh dan pemimpin rakyat Jambi yang dibuang ke Digul, Ternate, dan Nusa Kambangan. Dalam rangka mengamankan kekuasaannya tersebut pula, pemerintah Belanda secara ketat menerapkan pembatasan-pembatasan terhadap

⁴⁰ Ibid., 3.

⁴¹ Seperti adanya kongres al-Islam tahun 1926 di Bogor, organisasi Muhammadiyah 1928 dengan kongres XVII, serta reaksi kuat yang ditunjukkan masyarakat Minangkabau yang mengadakan rapat besar di Bukit Tinggi pada 18 Agustus 1928 yang dihadiri 800 guru dan ulama ditambah 200 orang perwakilan dari 115 organisasi Islam Minangkabau.

⁴² Chatib, *Kesultanan Jambi Dalam Konteks Sejarah Nusantara*, 64.

⁴³ Zainuddin, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, 64.

perkumpulan atau partai politik. Perkumpulan-perkumpulan atau organisasi politik yang tidak jelas tujuannya serta yang dianggap bertentangan dan dapat membahayakan keamanan pemerintah Hindia Belanda dilarang.⁴⁴

Penutup

Penyelenggaraan pendidikan di Jambi oleh Belanda baru dimulai pada dasawarsa ke-dua abad ke-20, ketika perekonomian Jambi mulai menguntungkan bagi Belanda dan perlawanan di Jambi berhasil diredam. Pada masa itu, dimulailah babak baru pembangunan infrastruktur serta lembaga pendidikan formal di Jambi berupa *volkschool*, *vervolgschool*, dan HIS. Semangat untuk menyelenggarakan pendidikan bagi pribumi menjadi kontradiksi ketika Belanda justru menjegal pendidikan yang diselenggarakan oleh pribumi sendiri, terutama pendidikan Islam. Demi mengamankan posisinya, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan kebijakan terkait pendidikan berupa ordonansi sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap pendidikan Islam yang dinilai mengkhawatirkan.

Kebijakan Belanda terkait pendidikan diantaranya dengan mengeluarkan ordonansi-ordonansi. Ordonansi Guru tahun 1905 belum berlaku di Jambi, akan tetapi Ordonansi Guru 1925 tersebut secara praktis berlaku di Jambi. Belanda juga mengeluarkan *Staatsblad van Nederlansch-Indie* tahun 1932 No. 494 dan 495, yang mengatur mengenai sekolah liar, yakni sekolah swasta yang tidak disubsidi pemerintah Hindia Belanda.

Menanggapi kebijakan tersebut, sikap masyarakat Jambi cenderung defensif. Bentuk respon umat Islam Jambi terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda terkait pendidikan secara umum terepresentasikan oleh Tsamaratul Insan termasuk madrasah-madrasah di bawahnya serta sikap masyarakat Jambi pada umumnya. Mereka tidak melakukan perlawanan yang agresif dan melibatkan serangan fisik, melainkan dengan mematri semangat anti kafir. Materi-materi pelajaran madrasah-madrasah di Bawah Tsamaratul Insan menolak ilmu umum, bahkan pakaian-pakaian yang identik dengan Belanda juga dilarang. Sikap defensif tersebut disebabkan kejenuhan sebagian masyarakat atas Perang Jambi yang hampir setengah abad, serta politik isolatif yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap Jambi pasca Perang Sarekat Abang. Pembersihan bibit pemberontakan di Jambi dari akarnya serta menutup Jambi dari segala pergerakan nasional yang berlaku di luar wilayah Jambi, telah mendorong sikap defensif masyarakat Jambi dalam merespon kebijakan kolonial Belanda.

Daftar Pustaka

Bafadhal, Fauzi MO. "Sejarah Sosial Pendidikan Islam Di Jambi." Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Budihardjo. "Perkembangan Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Masyarakat Daerah Jambi 1926-1942." Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2001.

⁴⁴ Ibid., 73.

- Chatib, Adrianus. *Kesultanan Jambi Dalam Konteks Sejarah Nusantara*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Fadhil. "Pembaharuan Pendidikan Islam KH. Abdul Qadir Di Madrasah As'ad Seberang Kota Jambi 1951-1970." Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Hak, Nurul. "Perubahan Sosial Pesantren Di Tasikmalaya Pada Paruh Pertama Abad Ke-20 (1905-1950)." Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2003.
- Makmur, Djohan, and dkk. *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993.
- Muttalib, Jang A. "Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial Di Jambi Pada Perempatan Pertama Abad Ke-20." *Jurnal Prisma*, 1980.
- Muzakkir, Ali. "Transformasi Pendidikan Islam Di Jambi: Dari Madrasah Ke Pesantren." *Islam Realitas: Jurnal of Islamic & Social Studies* 03, no. 01 (June 2017).
- Nasution, S. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung: Jemmars, 1983.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Qodri, Muhammad. "Dinamika Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Pondok Pesantren Aljauharen Kota Jambi." *Media Akademika* 25, no. 03 (July 2010).
- Saleh, Jahdan Ibnu Humam. "Perkembangan Pendidikan Muhammadiyah Pada Pemukiman Santri Di Kota Yogyakarta 1912-1942." Thesis, Universitas Gadjah Mada, 1991.
- Suminto, Aqib H. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Untung, Moh. Slamet. "Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren." *Jurnal Forum Tarbiyah* 11, no. 01 (June 2013).
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995.
- Zainuddin, R. *Sejarah Pendidikan Daerah Jambi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980.
- Zainuddin, R., and dkk. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Zuhairini. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.